



# ANALISIS KOMPREHENSIF MODEL DEMOKRASI PEMILIHAN PEMIMPIN DAERAH

Wacana Perubahan Pilkada:  
Langsung vs Tidak Langsung

# 2025



LITBANG BACAINI.ID  
Research & Development Division

bacaini.id

# CAKUPAN ANALISIS KOMPREHENSIF

---



6

## MODEL DEMOKRASI

Analisis perbandingan sistem pemilihan pemimpin daerah di berbagai negara di dunia.



580

## KURSI DPR RI

Pemetaan pola dukungan partai politik di parlemen terhadap wacana perubahan sistem.



2.69M

## RESPONS PUBLIK

Analisis big data dari percakapan media sosial dan sentimen publik.

Analisis mencakup perbandingan internasional, sejarah, dan dinamika politik.

Sumber: Litbang Bacaini.ID

# DUNIA MENGENAL 4 MODEL UTAMA PEMILIHAN KEPALA DAERAH



## ☒ PEMILIHAN LANGSUNG

Rakyat memilih langsung kepala daerah melalui pemungutan suara. Memberikan legitimasi politik tertinggi.

CONTOH: AS, Brasil, India, Indonesia, Korea Selatan

## ♫ PEMILIHAN OLEH LEGISLATIF

Kepala daerah dipilih oleh anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD/Parlemen).

CONTOH: Belanda, Malaysia, Singapura

## ⌚ COUNCIL-MANAGER

Dewan kota yang terpilih menunjuk seorang manajer profesional sebagai eksekutif daerah.

CONTOH: AS (beberapa kota), Eropa

## ♫ PENGANGKATAN PUSAT

Kepala daerah diangkat dan ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat tanpa proses pemilihan lokal.

CONTOH: Timur Tengah, Rezim Otoriter

# PERBANDINGAN: LANGSUNG VS DPRD

## ✓ PEMILIHAN LANGSUNG

### Legitimasi Kuat

Mandat langsung dari rakyat, akuntabilitas vertikal yang jelas.

### Partisipasi Publik

Meningkatkan kesadaran politik dan keterlibatan warga negara.

### Kelemahan: Biaya Tinggi

Membutuhkan anggaran besar untuk penyelenggaraan dan kampanye.

## ✗ PEMILIHAN OLEH DPRD

### Efisiensi Anggaran

Biaya penyelenggaraan jauh lebih murah dan proses lebih cepat.

### Stabilitas Politik

Mengurangi potensi konflik horizontal di masyarakat.

### Kelemahan: Politik Uang

Rawan transaksi politik elitis (money politics) di tingkat dewan.



# EVOLUSI SISTEM PEMILIHAN

1945-59

1965-98

1999-04

2005-Kini

## DPRD MEMILIH

Kepala daerah dipilih oleh DPRD sebagai representasi kedaulatan rakyat di daerah.

## SENTRALISTIK

Era Orde Baru, penunjukan terpusat oleh pemerintah pusat (Kemendagri).

## TRANSISI

Kembali dipilih oleh DPRD pasca reformasi, namun diwarnai politik uang.

## LANGSUNG

Pilkada langsung oleh rakyat dimulai, memberikan mandat penuh.



# SEMANGAT REFORMASI 1998

"Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat adalah **amanat reformasi** yang tidak boleh dikhianati."

— Filosofi Demokrasi Langsung

## KONTEKS HISTORIS

Pilkada langsung lahir sebagai koreksi atas praktik sentralistik Orde Baru dan politik transaksional di DPRD pada masa transisi.



# WACANA KEMBALIKE PEMILIHAN OLEH DPRD

## ISU UTAMA

Usulan revisi UU Pilkada untuk mengembalikan mekanisme pemilihan ke tangan DPRD.

Rp 100 Trt<sup>t</sup>  
ESTIMASI PENGHEMATAN

Potensi penghematan anggaran negara dan biaya politik kandidat jika sistem diubah menjadi pemilihan oleh DPRD. pilkada langsung.

- Didorong oleh evaluasi terhadap tingginya biaya politik (high cost politics).
- Kekhawatiran akan polarisasi sosial yang tajam akibat pilkada langsung.
- Argumen keselarasan dengan Silia ke-4 Pancasila (Permusyawaratan/Perwakilan).



# ARGUMEN KUNCI: EFISIENSI VS HAK RAKYAT



## • MENDUKUNG PEMILIHAN DPRD

### "Solusi atas mahalnya biaya demokrasi dan korupsi kepala daerah."

- Menghemat triliunan rupiah anggaran negara (APBN/APBD).
- Meminimalisir konflik horizontal antar pendukung.
- Fokus kepala daerah pada kinerja, bukan pencitraan kampanye.

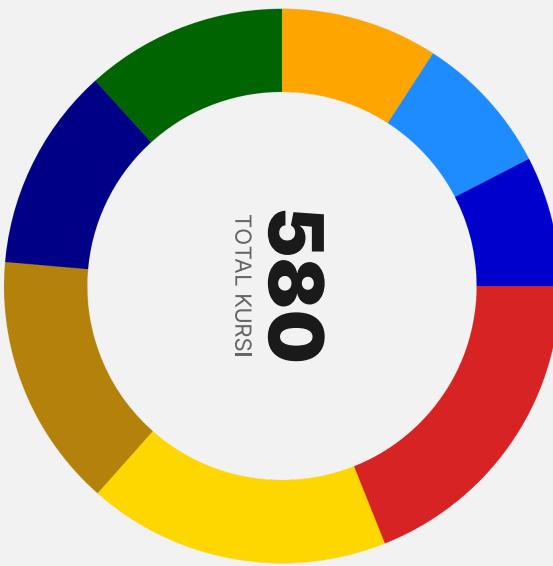
## • MENOLAK PEMILIHAN DPRD

### "Kemunduran demokrasi dan perampasan hak konstitusional rakyat."

- Potensi oligarki partai semakin kuat di daerah.
- Rakyat kehilangan hak untuk menentukan pemimpinnya sendiri.
- Rawan 'transaksi di ruang gelap' antar elit partai.

# PETA POLITIK DPR RI (580 KURSI)

## KOMPOSISI PARTAI



**Analisis Koalisi:** Mayoritas partai pendukung pemerintah (KIM Plus) menguasai lebih dari 70% kursi, memuluskan jalan bagi revisi UU Pilkada jika disepakati di tingkat elit.

# BIG DATA: SUARA PUBLIK DI MEDIA SOSIAL

Periode Analisis: 1 Januari 2024 - 1 Januari 2025



## 2.69M

TOTAL VIEWS



## 13.8K

MENTIONS

Jumlah tayangan konten terkait isu Pilkada di berbagai platform.



## 105K

ENGAGEMENT

Interaksi (like, share, comment) yang menunjukkan tingkat attensi.

"Tingginya volume percakapan menunjukkan bahwa isu mekanisme Pilkada sangat sensitif dan menjadi perhatian utama publik digital."



# TIKTOK & INSTAGRAM DOMINAN POSITIF, TWITTER & REDDIT KRITIS

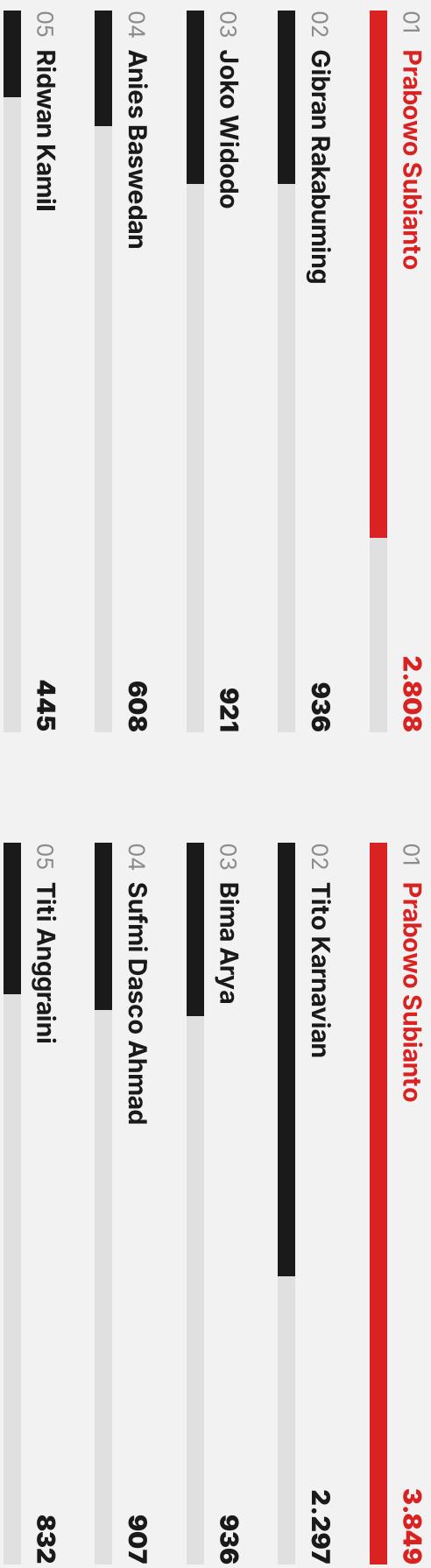
- SENTIMEN POSITIF
- SENTIMEN NEGATIF
- NETRAL



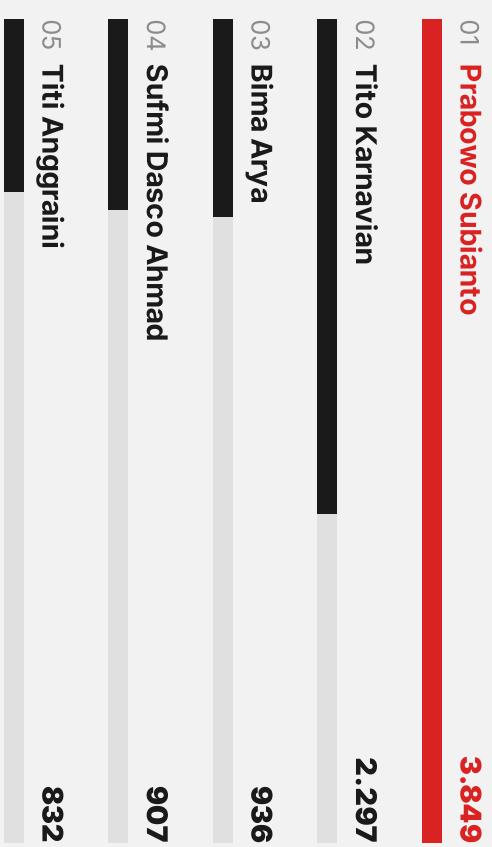
# PRABOWO SUBIANTO MENDOMINASI PERBINCANGAN

ANALISIS FREKUENSI SEBUTAN (MENTIONS) DI MEDIA SOSIAL

## | TOP 5 TOKOH POLITIK



## | TOP 5 INFLUENCER / PEJABAT



# TIGA UU DAN PASALKONSTITUSI MENJADI TANTANGAN HUKUM

## ↗ UU YANG HARUS DIREVISI

### UU No. 10 Tahun 2016 TENTANG PILKADA

Mengatur mekanisme pilkada langsung. Harus direvisi total untuk mengubah sistem pemilihan.

### UU No. 7 Tahun 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

Mengatur hubungan pemilu legislatif dan pilkada. Perlu penyesuaian rezim pemilu.

### UU No. 23 Tahun 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Mengatur kewenangan kepala daerah dan mekanisme pemilihannya.

## Syarat Konstitusional

### PASAL 18 AYAT (4) UUD 1945

"Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah... dipilih secara demokratis."

### PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

MK menafsirkan frasa "demokratis" sebagai pemilihan langsung oleh rakyat dengan atasas Luber Jurdil (Putusan No. 55/PUU-XVIII/2019).

# POLARISASI OPINI: ELITE VS PUBLIK

■ ELITE POLITIK

## MENDUKUNG

Koalisi pemerintah solid mendukung perubahan sistem demi efisiensi anggaran.

- Dukungan mayoritas di DPR
- Didorong oleh pimpinan partai
- Argumen penghematan biaya

■ GRASSROOTS & PAKAR

## TERPOLARISASI

Resistensi kuat dari kalangan aktivis dan akademisi, namun publik umum terbelah.

- Aktivis & Pakar: Menolak keras
- Medsos Visual: Cenderung Positif
- Medsos Diskursif: Sangat Kritis



### KESIMPULAN & PREDIKSI

Secara matematis usulan berpeluang besar disahkan, namun **Tekanan Publik** dan **Uji Konstitusionalitas di MK** akan menjadi penentu akhir.

\*Catatan: Wacana ini masih dalam tahap diskusi dan belum menjadi kebijakan resmi.

# TERIMA KASIH

PRESENTER

**Litbang Bacaini.ID**

SUMBER DATA

Riset Media Sosial, Media Online, dan Analisis Politik 2024-  
2025

KUNJUNGI KAMI



bacaini.id